



Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Tanah Datar

Nadia Putri Sari¹, Rina Asmeri¹, Meri Yani¹

¹Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

✉ nadiasari105@gmail.com*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Jenis data adalah data kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar sebanyak 55 orang dengan pengambilan sampel secara purposive sampling maka jumlah sampel berjumlah 31 orang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) secara simultan / bersama - sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Persentase kontribusi variabel independen transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,648 atau 64,8%. Sedangkan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti motivasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan variabel lainnya.

Article Information:

Received Oktober 9, 2024

Revised November 13, 2024

Accepted Desember 17, 2024

Keywords: *Transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan*

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

How to cite:

Sari, N., P. Asmeri, R. Yani, M. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Satpolm Pp dan damkar Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 192-202.

E-ISSN:

3046-9120

Published by:

The Institute for Research and Community Service

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada beberapa waktu belakangan ini terdapat tuntutan yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga sektor publik untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga sektor publik. Bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, harus diaudit oleh pihak yang profesional. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

Begitupula dengan salah satu instansi pemerintah yaitu dinas satpol PP dan damkar kabupaten tanah datar yang diharuskan memberikan laporan keuangan yang berkualitas berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari BPK. Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau disebut juga Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar selalu memberikan laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan tersebut merupakan gabungan dari laporan pertanggung jawaban keseluruhan pegawai atas pengeluaran yang dilakukan untuk kelancaran kegiatan instansi. Seringkali laporan diberikan terlambat dari waktu yang telah ditentukan sehingga bagian keuangan instansi kewalahan untuk merekap dan melaporkan kepada kepala bidang keuangan. Hal ini berakibat tertundanya keseluruhan alur untuk membuat laporan keuangan final yang akan dipublikasikan. Setelah laporan keuangan rampung maka akan ada beberapa pihak yang akan memeriksa ulang laporan keuangan tersebut.

Sebelum laporan keuangan di publikasikan maka akan ada pihak BKD (Badan Keuangan Daerah) yang memeriksa terlebih dahulu laporan keuangan tersebut akan kebenarannya. Menurut kabid keuangan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar dan berdasarkan SIMDA tanah datar pada tahun 2020 tidak ada kesalahan yang ditemukan oleh pihak BKD namun pada tahun 2021 berdasarkan berita acara rekonsiliasi aset dari pihak BKD menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yaitu adanya belanja aset alat pemadam kebakaran yang tidak tercatat sebesar Rp 151.034.570,- sehingga harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Kemudian pihak keuangan perlu merevisi kembali laporan yang telah diperiksa pihak BKD. Setelah semuanya rampung maka pihak BKD akan melanjutkan laporan tersebut kepada BPK untuk di audit dan dilanjutkan ke pemerintah pusat agar dapat dipublikasikan. Hal ini tentu saja harus lebih diperhatikan agar Kabupaten Tanah Datar dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan berdasarkan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitasnya.

Teori stakeholders menjelaskan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders (Hadi, 2018). Oleh karena itu, pengungkapan sosial harus dianggap

sebagai wujud komunikasi antara manajemen dengan stakeholders. Teori stakeholder berkaitan dengan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan stakeholder tersebut supaya mereka memiliki kepercayaan terhadap entitas, salah satu untuk meningkatkan kepercayaan adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Entitas yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah pemerintah yang harus menyajikan laporan keuangan berkualitas sehingga bermanfaat bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari entitas tersebut.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Pertanggungjawaban atas laporan yang di berikan oleh lembaga merupakan hasil dari kinerja yang diberikan selama periode yang telah ditentukan. Selain itu, penyajian laporan pertanggungjawaban yang diberikan dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan untuk melakukan tugas yang diberikan secara baik dengan tujuan perkembangan masyarakat untuk menjadi lebih baik melalui pengelolaan alokasi dana desa secara transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan.⁵ Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2019). Bersatu dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herindraningrum (2021) dengan judul Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia : Literature Review dengan hasil Secara parsial dan simultan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2021) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengurus Organisasi Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Kerja dengan hasil akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) dengan judul Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan hasil transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

METODE

Metode (Method) untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai penulis akan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dokumentasi, wawancara, kuesioner. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer melalui Kuesioner disebar dan sekaligus dikumpulkan langsung oleh peneliti (Hafizi et al., 2022; Nadhirah et al., 2023; Arifin et al., 2024; Engkizar et al., 2024). Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari pegawai Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar sebanyak 55 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan didapatkan pegawai Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang didapati sebanyak 31 orang. Analisis penelitian ini menggunakan Regresi linear berganda untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua menggunakan program SPSS 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan maksud memeriksa apakah terdistribusi normal atau tidak.

Hasil Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.85395670
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.074
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
This is a lower bound of the true significance.		

Dari tabel diatas didapatkan nilai residual sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 dari nilai sampel sebesar 31 yang berarti data yang sedang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Variabel	Hasil Uji Multikolinieritas		Keterangan
	Collinearity Statistics		
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Transparansi	0.999	1.001	Tidak Multikolinieritas
Akuntabilitas	0.999	1.001	Tidak Multikolinieritas

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah lolos dari uji multikolinearitas dikarenakan nilai VIF lebih kecil dari 10, yang berarti data yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas		
Coefficients ^a		
	t	Sig.
Model		
(Constant)	1.934	.405
Transparansi	.085	.998
Akuntabilitas	-1.774	.958

a. Dependent Variable: Abs_res

Dari perhitungan diketahui bahwa seluruh variabel yang memenuhi syarat uji heteroskedastisitas yang memiliki nilai sig besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linier Berganda						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	22.731	16.358		1.390	.176
	Transparansi	.852	.216	.636	4.241	.001
	Akuntabilitas	.704	.166	.626	4.242	.000

a. Dependent Variable: Kualitas_laporan_keuangan

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa konstanta sebesar 22,731 secara matematis menyatakan bahwa jika nilai transparansi dan akuntabilitas sama dengan nol maka nilai kualitas laporan keuangan adalah sebesar 22,731. Dengan kata lain nilai kualitas laporan keuangan tanpa transparansi dan akuntabilitas adalah sebesar 22,731 satuan. Nilai koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,852, koefisien bernilai positif artinya antara variabel transparansi terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif. Hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel transparansi sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,852 satuan. Kenaikan variabel transparansi berakibat peningkatan pada variabel kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,704, koefisien bernilai positif artinya antara variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif. Hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel akuntabilitas sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,704 satuan. Kenaikan variabel akuntabilitas berakibat kenaikan pada variabel kualitas laporan keuangan.

Uji Koefisiensi Determinasi

Koefisien Determinan				
Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626 ^a	.691	.648	5.02432

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependen Variable: Kualitas_laporan_keuangan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,648 atau 64,8%, hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel independen transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,648 atau 64,8%. Sedangkan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti motivasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan variabel lainnya..

Uji t

Uji t						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.731	16..358		1.390	.176
	Transparansi	.852	.216	.636	4.241	.001
	Akuntabilitas	.704	.166	.626	4.242	.000

a. Dependent Variable: Kualitas_laporan_keuangan

Nilai t hitung dari variabel transparansi adalah sebesar 4.241 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.04841. Sehingga t hitung > t tabel dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0.001 < 0.05$ jadi H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Nilai t hitung dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 4.242 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.04841. Sehingga t hitung > t tabel dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0.000 < 0.05$ jadi H2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021.

Uji F

Uji F						
ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	454.528	2	227.264	19.003	.001 ^b
	Residual	706.827	28	25.244		
	Total	1161.355	30			

a. Dependent Variable: Kualitas_laporan_keuangan

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Dari tabel diatas diketahui nilai F hitung 19.003 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 4.16 (lihat lampiran 6) dan nilai sig yang dihasilkan dari perhitungan adalah 0.001 yang lebih kecil dari α yang digunakan sebesar 0.05 atau 5%. Sehingga H3

diterima dengan demikian dapat disimpulkan variabel transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) secara simultan / bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021.

PEMBAHASAN

Dari pembahasan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) secara simultan / bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Rincian pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018:25), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Mutathahirin et al., 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan yang bernilai positif berarti setiap peningkatan transparansi akan berdampak pada peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Dengan pengaruh positif maka dapat diketahui salah satu cara meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan meningkatkan transparansi dari instansi kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, transparansi menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan bagi setiap organisasi pemerintah dengan cara mempublikasikan setiap kegiatan transaksi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan atas prinsip keterbukaan publik sehingga setiap elemen masyarakat bebas mengakses informasi yang ada (Baidar et al., 2023). Di samping itu, transparansi dalam organisasi pemerintah berperan sangat penting untuk menghindari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap dan marak dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah yang tidak bertanggungjawab baik di Indonesia maupun di pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Zefri Maulana (2020) dengan judul Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan yang mendapatkan hasil transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan 81 keuangan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Andita Chayasari Pradana Putri (2022) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya yang mendapatkan hasil transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2019) akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sedangkan menurut Halim & Iqbal (2017) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan yang bernilai positif berarti setiap peningkatan akuntabilitas akan berdampak pada peningkatan terhadap 82 kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Dengan pengaruh positif maka dapat diketahui salah satu cara meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan meningkatkan akuntabilitas dari instansi kepada masyarakat.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wardani (2021) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengurus Organisasi Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Kerja yang mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Idawati (2019) dengan judul Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan Dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan yang mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut PSAK No.1 tahun 2018 laporan keuangan adalah penyajian tersruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menyajikan perjalanan sejarah sebuah entitas yang dikualifikasikan dalam nilai moneter. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) secara simultan / bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) yang bernilai positif berarti setiap peningkatan transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) akan berdampak pada peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Dengan pengaruh positif maka dapat diketahui beberapa cara meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari instansi kepada masyarakat.

Kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Herindraningrum (2021) dengan judul Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia : Literature Review yang mendapatkan hasil bahwa Secara parsial dan simultan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Rosalin (2018) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mendapatkan hasil bahwa secara parsial dan simultan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Hal ini terbukti dari nilai t hitung dari variabel transparansi adalah sebesar 4.241 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.04841. Sehingga t hitung $>$ t tabel dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0.001 < 0.05$ jadi H_1 diterima. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Hal ini terbukti dari nilai t hitung dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 4.242 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.04841. Sehingga t hitung $>$ t tabel dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0.000 < 0.05$ jadi H_2 diterima. Transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) secara simultan / bersama - sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Terbukti dari nilai F hitung 19.003 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 4.16 dan nilai sig yang dihasilkan dari perhitungan adalah 0.001 yang lebih kecil dari α yang digunakan sebesar 0.05 atau 5%, sehingga H_3 diterima. Persentase kontribusi variabel independen transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,648 atau 64,8%. Sedangkan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti motivasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan variabel lainnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi atau pihak lain yang berkepentingan. Adapun saran yang diberikan, antara lain. Bagi Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas yang instansi kepada masyarakat. Maka penulis memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan berdasarkan tingkat capaian responden pada lampiran 2 yaitu Tingkat capaian

responden terendah dari variabel transparansi adalah pengungkapan. Untuk itu instansi dapat meningkatkan dengan cara menyajikan informasi laporan keuangan secara lengkap dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Instansi juga bisa menyediakan sistem pelayanan pengaduan serta merespon secara cepat atas pengaduan dari masyarakat tersebut. Instansi juga harus bisa menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga non pemerintah lainnya dan juga media massa. Tingkat capaian responden terendah dari variabel akuntabilitas adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan dapat ditingkatkan dengan cara instansi fokus untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Instansi juga harus menindak tegas apabila ada oknum yang melanggar aturan baik korupsi atau kolusi atau yang memungut biaya atas pelayanan, selain itu instansi juga bisa menyediakan program alternatif apabila ada program yang tidak terealisasi serta tanggung jawab atas program-program dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tingkat capaian responden terendah dari variabel kualitas laporan keuangan adalah dapat dibandingkan. Kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan dengan cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Bagi akademik, Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan untuk menambah variasi variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti motivasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan variabel lainnya dan objek yang di teliti diperluas tidak hanya pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar.

REFERENSI

- Arifin, Z., & Rizaldy, M. (2023). Pengaruh Etos Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT.Surya Segara Safety Marine. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5.
- Baidar, B., Mutathahirin, M., & Fitriani, F. (2023). Implementation of Card Sort Learning Media in Islamic Education Class in MIN. *Khalaqa: Journal of Education and Learning*, 1(2), 1-10.
- Engkizar, E., Jaafar, A., Sarianto, D., Ayad, N., Rahman, A., Febriani, A., ... & Rahman, I. (2024). Analysis of Quran Education Problems in Majority Muslim Countries. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 3(1), 65-80.
- Hadi, N. (2018). *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3. Manajemen YKPN*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu.
- Herindraningrum, F. F. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia : Literature Review. *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Herindraningrum, F. F. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia : Literature Review. *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Idawati, W. (2019). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan Dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Maulana, Z. (2020). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 4.

- Mutathahirin, M., Hudamahya, A., & Hamdi, H. (2020). Community Assessment of Salafi Studies in the City of Padang. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 3(2), 47-55.
- Nadhirah, A. N., Kurniawati, T., & Nor, Z. B. M. (2023). Analysis of the Influence of Investment in Education and Health on Economic Growth in Malaysia. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 6(2), 65-7
- Rosalin, S. N. (2018). Pengaruh AKuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Student Paper. Universitas HKBP Nommensen.
- Wardani, D. K. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengurus Organisasi Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Kerja. Bisnis. *Jurnal Disrupsi*, 4.

Copyright holder:

© Sari, N., P. Asmeri, R. Yani, M.

First publication right:

Jurnal Riset Akuntansi

This article is licensed under:

CC-BY-SA